

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN *SINGLE PARENT* DALAM  
MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN WITIHAMA  
KABUPATEN FLORES TIMUR

Oleh:

Frans B. Tokan<sup>1</sup>.

Email: frans.fisipunwira@gmail.com

Abstrak

Masalah perempuan dewasa ini seringkali bersentuhan dengan lemahnya posisi tawar. Akibatnya kaum perempuan dan anak-anak mengalami proses pemiskinan yang akut dan terpinggirkan di hampir semua aspek. Studi ini bertujuan menganalisis model pemberdayaan perempuan *single parent* yang paling relevan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi di lapangan.

Hasil analisis membuktikan perempuan *single parent* cukup gigih menjalankan tugas gandanya meskipun dibawah tekanan hidup yang luar biasa beratnya dan tak sedikit perempuan belum terbebas dari kemiskinan, karena terkendala kultur dan struktur yang tak berpihak. Keuletan dan ketabahan perempuan *single parent* bukan saja mengatasi kemiskinan semata, tetapi juga untuk merawat hubungan sosial.

Dengan demikian perencanaan dan penganggaran desa mesti mempertimbangkan *gender budget* dan *pro poor budget* melalui program beasiswa anak desa; Pemerintah daerah & desa agar lebih proaktif dan agresif mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, melalui program inovatif yang lebih *responsive gender* dan fokus pada pendidikan vokasi, bantuan modal usaha, magang dan pelatihan ketrampilan berbasis sumber daya lokal secara terprogram dan berkelanjutan. .

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Kemiskinan.

Abstract

Women's problems today often intersect with a weak bargaining position. As a result, women and children experience an acute process of impoverishment and are marginalized in almost all aspects. This study aims to analyze the model of empowering single parent women in overcoming poverty. This study uses qualitative methods, with interview data collection techniques and field observations.

The results of the analysis prove that single parent women are quite persistent in carrying out their dual duties even though they are under very heavy life pressure and not a few women have not been free from poverty, due to cultural constraints and impartial structures. The tenacity and fortitude of single parent women are not only to overcome poverty, but also to maintain social relations.

Thus, village planning and budgeting must consider gender budgets and pro-poor budgets through the village children's scholarship program; Local & Village Governments to be more proactive and aggressive in implementing Law no. 6 of 2014 concerning Villages, through

---

<sup>1</sup> Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan – Universitas Katolik Widya Mandira

innovative programs that are more gender responsive and focus on vocational education, business capital assistance, internships and skills training based on local resources in a programmed and sustainable manner.

Keywords: Empowerment, Single Parent Women and Poverty.

## **PENDAHULUAN**

Problem perempuan desa dewasa ini seringkali berkenaan dengan lemahnya kapasitas sumberdaya dan posisi tawar. Akibatnya kaum perempuan dan anak-anak mengalami proses pemiskinan yang akut dan terpinggirkan di hampir semua akses program penanggulangan kemiskinan. Isu gender dan ketakberdayaan perempuan dalam kemiskinan rumah tangga adalah salah satu akar penyebab diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.

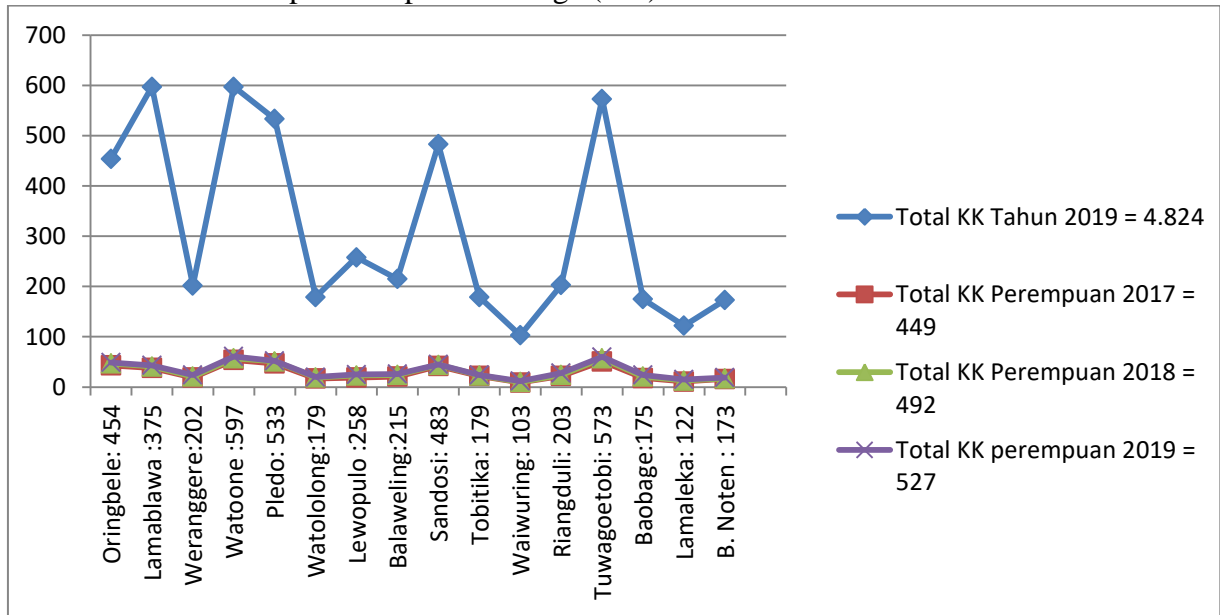
Menurut Mitter, proses peminggiran juga telah mengakibatkan perempuan berada dalam kondisi dengan pilihan terbatas dan sulit pada pekerjaan yang tidak terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan, (Hartini, 2012:67). Pada umumnya diskriminasi sosial yang dialami perempuan telah memperburuk kualitas kehidupannya di bidang ekonomi, politik dan hukum. Hal ini sesungguhnya sudah lama berlangsung dalam sistem budaya patriarki yang sangat dominan, dimana perempuan nyaris tak diberi tempat di ruang publik guna mengekspresikan dirinya. Akibatnya kepercayaan diri perempuan sebagai sosok yang mandiri nyaris tenggelam di ranah publik. Seiring dengan itu, terjadi peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan secara signifikan sepanjang tahun 2019 sebesar 431.471 kasus kekerasan di Indonesia, (Kompas.Com, 2020) sehingga perempuan makin rentan dan terjerat dalam gubangan kemiskinan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari Bappenas Tahun 2015-2019, jelas terlihat masih ada kesenjangan gender, antara lain diperlihatkan oleh data perbedaan rata-rata upah per bulan antara pekerja perempuan dan laki-laki dimana perempuan menerima rata-rata Rp1,427 juta sedangkan laki-laki Rp.1,795 juta, dan data Sakernas 2018 memperlihatkan kesenjangan kontribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki cenderung meningkat. Sementara itu, data TNP2K menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan mengalami peningkatan 1,09% sedangkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki menurun 1,09% selama tahun 2006-2012.

Berdasarkan data penduduk yang diolah dari Kantor Camat Witihama diketahui jumlah KK yang dikepalai oleh ibu rumah tangga diperkirakan perdesember 2019 sebanyak 527 orang. Jumlah perempuan KK yang relatif tinggi ini diprediksi akan terus bertambah seiring dengan

bertambahnya angka perkawinan dikalangan usia muda. Meningkatnya perempuan sebagai KK ini setidaknya dapat menerangkan tingkat kemiskinan kaum perempuan di Kecamatan itu cukup dominan mengingat banyaknya KK usia muda yang dikepalai oleh perempuan rata-rata berpenghasilan rendah. Berikut deskripsi data jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan di Kecamatan Witihama dalam tiga tahun terakhir pada grafik 1 berikut.

Grafik 1: Keadaan Penduduk menurut Jumlah KK perdesa dan Perkembangan Jumlah Perempuan Kepala Keluarga (KK) di Kecamatan Witihama



Sumber: diolah dari data penduduk di Kantor Camat Witihama, Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa program pemberdayaan terhadap perempuan menjadi makin relevan di tengah terus meningkatnya jumlah perempuan sebagai kepala keluarga. Sementara itu di sisi lain model pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga dilihat dari sudut pandang budaya setempat merupakan sebuah konsep yang sangat kontroversial karena sejatinya hanya laki-laki yang diakui dan dihormati sebagai kepala keluarga.

Cara pandang yang tak lazim ketika menempatkan perempuan sebagai kepala keluarga merupakan sebuah pemikiran yang sangat bertolak belakang dengan tradisi setempat yang masih kuat menganut budaya patriarki. Budaya ini sejatinya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dengan kedudukan yang sangat dominan dan istimewa dalam proses pengambilan keputusan rumah tangga, sekaligus memosisikan perempuan pada posisi yang sangat lemah di ranah publik.

Studi ini mencoba untuk menjawab pertanyaan, apakah model pemberdayaan perempuan

*single parent* mampu mengatasi kemiskinannya?

## **KAJIAN TEORITIK**

### **Konsep dan Pengukuran Kemiskinan**

Mengkaji penduduk miskin setidaknya dapat diamati dari beberapa karakter, seperti diungkapkan Remi dan Tjiptoherijanto, (2003 :15-18) di antaranya: (1) karakter ekonomi dari penduduk miskin adalah mencakup: (a) informasi terkait pekerjaan kepala rumah tangga; (b) pola pengeluaran rumah tangga, yakni berapa persen dari pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan dan berapa banyak bagi non pangan; (2) karakter sosial budaya, mencakup tingkat pendidikan anggota keluarga dan rasio yang lulus dari tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah terkait yang didasarkan pada Susenas Tahun 1990. Pandangan di atas setidaknya memberi gambaran tentang kemiskinan yang dapat dipahami dari sudut pandang ekonomi dan sosial budaya masyarakat, terkait pekerjaan, pola konsumsi dan akses pendidikan.

Menurut Bappenas, (2004) kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau perempuan tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Untuk mewujudkan hak dasar itu, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain: pendekatan kebutuhan dasar, pendekatan pendapatan, pendekatan kemampuan dasar dan pendekatan obyektif dan subyektif.

Selain itu BPS, (2008) pun memberikan acuan kemiskinan tersebut dalam rangka menetapkan garis kemiskinan seseorang, yakni dengan menggunakan tiga jenis indikator kemiskinan absolut (termasuk timbulnya kemiskinan), indeks jurang kemiskinan dan indeks kesulitan kemiskinan. Kemiskinan absolut menurut BPS adalah mengukur jumlah dari penduduk miskin, sedangkan timbulnya kemiskinan atau rasio menghitung kepala ditunjukkan sebagai persentase kemiskinan pada total penduduk. Sedangkan jurang kemiskinan mengukur rata-rata jurang pemisah antara pendapatan kaum miskin dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks kesulitan adalah indeks jurang kemiskinan yang sensitif didistribusikan.

Kemiskinan absolut menurut BPS, (2008) adalah kondisi di bawah pendapatan yang menjamin kebutuhan dasar pangan, pakaian dan perlindungan. Sedangkan esensi-esensi lain terkait kemiskinan dapat ditambahkan sesuai kondisi kontekstual. Dalam konteks ini sebenarnya yang menentukan miskin atau tidak miskinnya seseorang adalah semata-mata persoalan

penilaian, sehingga sulit membuat perbandingan antara kemiskinan yang satu dengan lainnya. Selain itu apa yang dianggap kemiskinan berbeda menurut standar kehidupan dari aspek waktu dan wilayah. Sedangkan menurut Sudarwati, (2009:27) bahwa kemiskinan memiliki wujud majemuk, termasuk rendahnya tingkat dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupannya, keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok lainnya seperti : kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, kehidupan bergelandangan, tinggal di tempat kumuh, lingkungan tidak aman serta diskriminasi dan keterasingan sosial. Terkait dengan itu dalam bagian pengantar Jurnal Mandatory, (Edisi 3/Tahun 3/2007) disebutkan kemiskinan yang diderita masyarakat Indonesia tidak hanya menyangkut masalah penampakan fisik dan makan tetapi juga mengenai segala hal yang diperlukan untuk menjunjung tinggi martabatnya. Hal itu juga ditegaskan oleh Amartya Sen dalam pengantar Jurnal Mandatory, (2007) pencabutan kebebasan, hak politik dan hak-hak sipil lainnya sebenarnya adalah proses pemiskinan itu sendiri.

Kemiskinan sebenarnya mencakup semua dimensi kehidupan manusia termasuk hak menggunakan kebebasan dan kemerdekaannya sebagai warga sipil. Karena itu ketika hak menggunakan kebebasan dan kemerdekaan sebagai warga sipil tak bisa teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka sebenarnya pada saat yang sama secara struktural telah terjadi proses marjinalisasi dan pemiskinan seseorang dalam masyarakat. Ciri atau tanda-tanda kemiskinan sebenarnya berawal dari terabaikannya hak-hak sipil seseorang terutama dalam mengakses sumber-sumber daya ekonomi dan politik yang disediakan negara. Menurut Sudarwati, (2009:17) pada umumnya ada beberapa ciri kemiskinan, antara lain: (1) Rumah tangga yang mempunyai banyak anak yang kepala rumah tangganya merupakan pekerja rumah tangga; (2) Tingkat pendidikan kepala rumah tangga maupun anggota keluarga rendah; (3) Pekerjaan sering berubah-ubah / tidak tetap dan apa saja pekerjaan kasar yang ditawarkan diterimanya; (4) Sumber pendapatan utama dari sektor pertanian; (5) Konsumsi gizi yang kurang berkualitas. Singkatnya konsep dan pengukuran kemiskinan sangatlah kompleks, karena banyak faktor ikut terlibat secara signifikan di dalamnya sehingga rumusan pengukuran atas akar persoalan kemiskinan membutuhkan sinergi sejumlah gagasan dan pendekatan yang berbeda dari para pakar lintas disiplin ilmu.

### **Penyebab Kemiskinan**

Secara umum kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor dan dapat dijelaskan dari beragam perspektif. Menurut Darwin, (2005a) ada empat faktor penyebab kemiskinan: (1) Faktor budaya, yakni karena kebiasaan-kebiasaan hidup dan nilai sosial yang ada dalam masyarakat, seperti watak malas dan konsumtif, orientasi hidup pragmatis, termanja oleh kekayaan alam yang berlimpah. Lebih lanjut menurut Darwin, (2005b) akar permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan juga terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan; (2) Faktor struktur sosial, karena kebijakan sosial, politik dan ekonomi negara yang tidak berpihak pada masyarakat yang bersangkutan. Menurut Revrison, (2010) kemiskinan struktural disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan masyarakat tertentu; (3) Faktor alam, karena kondisi alam yang kering dan tandus, tidak memiliki sumber alam yang melimpah, isolasi pemukiman penduduk, bencana alam, dan lain lain; (4) Konflik sosial politik termasuk peperangan, karena instabilitas sosial dan politik secara signifikan menghambat masyarakat terutama perempuan untuk membuka lapangan usaha dan meningkatkan produktivitasnya.

Menurut Hans Antlov dalam Harjojo, dkk (2008) tidak ada konsensus global tentang penyebab kemiskinan, tetapi setidaknya ada empat faktor dan seringkali dalam bentuk kombinasi atau komplikasi dua atau lebih faktor penyebab sekaligus, di antaranya: (1) Tidak adanya akses ke pasar kerja. Karena itu salah satu strategi pengentasannya adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dengan menumbuhkan perekonomian; (2) Kemiskinan disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan hilangnya habitat; (3) Sebuah keluarga bisa menjadi miskin karena pelayanan sosial yang tidak memadai, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tidak dapat diakses, karena anggaran tidak dialokasikan ke rumah tangga sasaran (miskin). Penanganannya adalah kebijakan anggaran yang lebih pro kepada rumah tangga miskin; (4) Mengapa beberapa keluarga hidup miskin, karena mereka secara langsung dan tidak langsung tidak diikutsertakan dalam proses kebijakan. Penanganannya adalah penguatan kapasitas masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan material maupun kebutuhan sosial dan politik. Berkaitan dengan itu menurut Triwibowo, (2012:88-89) faktor penyebab

kerentanan perempuan tidak hanya disebabkan oleh tingkat pendapatan yang rendah, karena hal ini hanyalah merupakan turunan dari alokasi sumber daya yang timpang di tingkat rumah tangga serta bias gender di tingkat struktural serta kebijakan dan hukum maupun sistem politik yang tidak melindungi hak-hak perempuan.

### **Pengertian Perempuan:**

#### **1. Hakikat Perempuan**

Perempuan pada dasarnya memiliki peran yang sangat vital dalam hampir seluruh dimensi kehidupan. Secara hakiki hanya perempuanlah satu-satunya manusia yang dilahirkan menjadi seorang “ibu” dan secara alamiah pula dipersiapkan mengandung anak, melahirkan serta dapat memelihara sejumlah anak yang tidak dilahirkan dari rahimnya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan segala macam budaya yang menyertainya, seringkali dilecehkan dan ditenggelamkan dalam sistem budaya serta disain kebijakan dan program Negara yang cenderung bias *gender*.

Sedangkan menurut Susanto, ed, cs, ( 2002:21) dalam tatanan masyarakat yang menganut sistem *matriarchat* perempuan dianggap mulia karena masyarakat mengakui pemerintahan perempuan dan karena manusia lahir dari ibu sehingga identitas anak dikaitkan dengan yang melahirkan. Selain itu menurut Susanto perempuan dalam masyarakat agraris di zaman kuno sangat menentukan dan disebut sebagai “ibu umum” yang diharapkan dapat memberi kepuasan bagi semua orang. Berkaitan dengan itu Engels, (2011) menyatakan hukum peribuan merupakan satu tahapan masyarakat umum. Namun perubahan masyarakat dari agraris dengan perkawinan kelompok menjadi perkawinan pasangan dengan mengatur hak milik perseorangan telah mempengaruhi perubahan cara pandang manusia dari hukum peribuan berganti menjadi hukum perbapakan.

Hukum perbapakan dengan perkawinan pasangan */somal* menuntut adanya satu bapak untuk identitas anak yang lahir. Karena itu hukum perbapakan ini kemudian menjadi basis dalam mengatur hukum keturunan dan hukum warisan.

Perspektif hukum perbapakan kemudian dipertegas dengan teori psiko analisis dari Sigmund Freud yang bertitik tolak pada konsep “*penis envy*” dimana perempuan dilihat sebagai laki-laki yang tak sempurna atau kurang lengkap, anggapan ini kemudian menimbulkan perasaan rendah diri bagi perempuan tak habis-habisnya, (Susanto, 2002:23). Itu sebabnya dalam rentang sejarah panjang kehidupan manusia, perempuan mengalami penderitaan dan

perlakuan tak adil secara masif dan berkelanjutan.

## 2. Perempuan Kepala Keluarga (Orang Tua Tunggal)

Keluarga merupakan suatu lembaga sosial dasar dimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dikatakan "Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga". Atau dengan kata lain kepala keluarga adalah orang yang bertanggungjawab penuh atas keberlangsungan hidup anggota keluarga, atau setidaknya menjadi basis keutuhan keluarga di hampir segala aspek.

Menurut Narwoko dan Suyanto, (2007) gejala seorang ibu yang menjadi orangtua tunggal secara otomatis ia akan menggantikan peran ayah dan peran ibu sendiri dan sekaligus menjadi seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab tidak ringan, sehingga sering kali menimbulkan sejumlah implikasi serius terutama bagi perkembangan dan masa depan anak-anak.

Menurut Mosse, (2007) istilah yang digunakan dalam menyebut perempuan sebagai kepala keluarga adalah *women headed* (yang dikepalai oleh perempuan) atau *women maintained* (yang dijaga oleh perempuan), yaitu perempuan yang memikul tanggungjawab tunggal menghidupi keluarganya. Pengertian ini sejalan dengan pemahaman tentang kepala keluarga itu sendiri, yaitu orang yang mempunyai tanggung jawab baik secara ekonomi maupun sosial terhadap keluarganya. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepala keluarga identik dengan pencari nafkah dan memenuhi semua kebutuhan hidup anggota keluarganya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan perempuan kepala keluarga atau *single parent* dalam konteks ini adalah perempuan yang memikul tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga yang menghidupi keluarganya.

Sedangkan menurut Nurmila, (2002) secara nyata perempuan kepala keluarga adalah perempuan-perempuan yang terdiri dari: janda yang suaminya meninggal dunia, janda cerai, perempuan yang ditinggal suami dalam jangka waktu lama tidak diberi nafkah, perempuan lajang dari keluarga yang tidak mampu dan perempuan yang suaminya sedang sakit atau cacat.

Berdasarkan Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2018 tercatat 10,3 Juta rumah tangga dengan 15,7 % perempuan sebagai kepala keluarga dan paling rentan terhadap masalah ekonomi dan jumlahnya dari tahun ke tahunnya terus mengalami peningkatan, (Kompas.com,

3/8/2020). Meningkatnya jumlah perempuan *single parent* di pedesaan diduga karena adanya migrasi, suami sakit dan meninggal dunia, perceraian, suami meninggalkan rumah (bekerja di luar kota, luar daerah dan luar negeri).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3 menerangkan bahwa suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang pembagian tugas-tugas dalam keluarga, akan tetapi pembagian tugas tersebut dirasa masih terkesan kaku. Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan seharusnya dikaji ulang, agar pihak perempuan memiliki keadilan atas hak-haknya dan tidak merugikan pihak perempuan. Dengan demikian kaum perempuan sebagai kepala keluarga mendapatkan pengakuan yang semestinya dari masyarakat dan perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga dilindungi hak-haknya oleh undang-undang.

### **Pemberdayaan:**

#### **1. Pengertian Pemberdayaan**

Konsep pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" yang berarti keberdayaan atau kekuatan. Pemberdayaan adalah suatu kondisi dimana setiap orang baik secara individu maupun kelompok memiliki kemampuan atau daya untuk mengakses berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat dan Negara. Pemberdayaan dalam bentuk apapun seharusnya memperhatikan arah dan cara pandang paradigma-ideologi. Karena paradigma ideologi pemberdayaan memberi landasan yang kokoh tentang arah dan tujuan pemberdayaan sehingga mampu membedah akar persoalan secara komprehensif, kritis dan tuntas. Menurut Fakih, (2008) dari cara pandang ideologi, upaya pemberdayaan masyarakat terutama yang dilakukan oleh NGO terbagi menjadi beberapa tipe, yakni: (1) konformisme, terdiri dari cara kerja yang didasarkan pada paradigma bantuan karitatif (belas kasih), berorientasi proyek dan menyesuaikan diri dengan struktur / sistem yang ada; (2) reformasi, didasarkan pada pengaruh ideologi *modernism-developmentalisme*. Salah dari tipe pemberdayaan ini adalah pendekatan dan metodologi yang cenderung *top down* dan non partisipatif; (3) transformasi, tipe ini cenderung mempertanyakan paradigma *mainstream* ( arus utama) atau kebiasaan utama yang ada dan ideologi yang tersembunyi di dalamnya serta berupaya menemukan paradigma alternatif yang dapat mengubah struktur dan sistem yang ada.

Konsep pemberdayaan juga lahir sebagai antitesis dari model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada mayoritas rakyat. Menurut Projono, O.S dan

Pranarka, A.M.W, (2006) konsep ini dibangun dari kerangka rasionalitas , diantaranya: (1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun sistem pengetahuan, politik, hukum, dan ideologi yang manipulatif guna memperkua legitimasi; (4) kapasitas sejumlah sistem di atas secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat yang saling bertentangan, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akibatnya menimbulkan dikotomi antara kelompok masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai. Karena itu yang bisa dilakukan guna menghapus dikotomi yang timpang ini adalah melalui proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan sesungguhnya dimaksud membebaskan kelompok yang selama ini termarginalisasi oleh sejumlah kelompok penguasa atau kelompok dominan.

## **2. Model Pemberdayaan Perempuan**

Meskipun pendampingan terhadap pemberdayaan perempuan kepala keluarga berbasis pada komunitas, namun kehadiran PEKKA juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kontrol perempuan kepala keluarga terhadap proses pengambilan keputusan mulai tingkat rumah tangga hingga negara. Ada empat fokus kegiatan yang dilakukan oleh Serikat PEKKA di beberapa daerah, sebagai model pemberdayaan perempuan yakni: *Pertama*, pemberdayaan hukum terkait identitas diri, seperti akta kelahiran, KTP, dan KK. *Kedua*, pendidikan politik dengan konsentrasi pada upaya mendorong partisipasi perempuan dalam musyawarah dari level desa sampai nasional. *Ketiga*, pendidikan sepanjang hayat melalui program kesetaraan fungsional dan pendidikan anak usia dini. *Keempat*, penguatan ekonomi melalui dana swadaya kelompok juga menjadi fokus kegiatan PEKKA untuk mendorong kemandirian secara ekonomi. *Kelima*, media rakyat dan taman bacaan masyarakat yang berisi publikasi dari perempuan-perempuan. *Keenam*, pendidikan dan penyadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Menurut Kabeer, (1999) konsep pemberdayaan berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, bentuk badan usaha atau perantara yang melakukan pemberdayaan, serta pencapaian atas hasil pemberdayaan tersebut. Akses terhadap sumber daya bukan hanya sumber daya material dalam pengertian ekonomi secara konvensional, tetapi juga meliputi sumber daya manusia dan sosial. Sedangkan Mayoux, (2000), mengatakan bahwa pemberdayaan perempuan terdiri atas

beberapa dimensi, yang meliputi pemberdayaan ekonomi untuk mengakses pendapatan yang akan berpengaruh pada keputusan bagaimana pendapatan dibelanjakan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan mereka; pemberdayaan sosial yang dihasilkan dari peningkatan status sosial mereka dalam masyarakat; serta pemberdayaan politik dari peningkatan partisipasi dalam kehidupan politik.

Ukuran untuk memantau kemajuan dalam mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, menurut Kabeer (2005), mencakup tingkat pendidikan, pekerjaan dan upah yang diterima, dan terlibat dalam politik. Ketiga indikator ini sekaligus menjadi sumber daya yang berpotensi untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi kesejahteraan hidup perempuan walaupun terdapat hubungan sosial yang mengatur akses ke sumber daya yang menentukan sejauh mana potensi ini dapat direalisasikan.

Menurut Maton, (2008) pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pengembangan berbasis pelibatan secara kelompok agar individu dan kelompok yang terpinggirkan mendapatkan kendali lebih besar atas kehidupan dan lingkungannya, mendapatkan sumber daya dan hak dasar serta mencapai tujuan hidupnya, agar dapat meminimalisasi kelompok marginal.

Itu berarti pemberdayaan perempuan tak bisa dilepaskan dari dimensi kesejahteraan dan partisipasi perempuan dalam segala aspeknya. Oleh karenanya peningkatan pendidikan dan penguatan ketrampilan tetap menjadi hal utama yang mesti diprioritaskan dengan mengikut sertakan peran perempuan secara aktif dalam berbagai program pemberdayaan perempuan.

Berkaitan dengan hal itu Amartya Sen, dalam Claros dan Zahidi, (2005:2) menegaskan pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan hak perempuan memberikan pengaruh yang kuat dalam meningkatkan kemampuan mereka menguasai lingkungannya dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi.

### **3. Faktor Penghambat Pemberdayaan Perempuan**

Salah satu faktor penghambat dalam mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga adalah faktor kultural yang masih kuat membelenggu kehidupan perempuan dalam masyarakat. Sistem budaya patriarki dalam rentang sejarah panjang telah menjadi hambatan tersendiri ketika perempuan sebagai ibu/istri ditinggal suami karena alasan meninggal dunia, cerai dan alasan lain kemudian terpaksa bertindak sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Pada hakikatnya dalam sistem budaya patriarki perempuan hanya diposisikan menjadi orang nomor dua sebagai ibu rumah tangga dengan mengemban sejumlah tugas domestik dalam rumah. Sedangkan laki-laki diposisikan sebagai orang nomor satu yang bertindak sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan dalam rumah sekaligus pencari nafkah bagi keluarga di wilayah publik. Posisi ini secara struktural telah melembaga dalam kurun waktu berabad-abad lamanya sehingga cukup sulit tergantikan dalam kondisi apapun.

Dalam kaitan dengan itu, menurut Rozaki, (2016:23-24) KOMNAS perempuan telah bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita dan membentuk Serikat Nasional (Seknas) PEKKA, transformasi dari “*Widows Project*“. Transformasi ini diharapkan membuat PEKKA menjadi lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan bukan dilihat dari status perkawinan semata. Karena itu kehadirannya tidak serta merta meniadakan nilai budaya patriarki melainkan sebagai sebuah wadah untuk menggalang kekuatan dan kebersamaan para ibu yang berstatus janda yang relatif tingkat kehidupan ekonomi rumah tangganya rendah.

Ketimpangan kehidupan rumah tangga seperti ini setidaknya telah berdampak pada lemahnya perhatian, kontrol serta hancurnya impian anak mereka akan masa depan yang lebih baik. Itu sebabnya perjuangan para janda ini harus lebih difokuskan pada penguatan kapasitasnya mengelola sumberdaya lokal dan usah-usaha produktif dan problem rumah tangga serta menyiapkan pendidikan anak-anak meraih masa depannya. Selain itu, masih ada sejumlah faktor lain sesuai temuan penelitian WRI yang dikutip Madjowa dalam Jurnal Perempuan No.46, (2006:124) di delapan daerah Indonesia bahwa yang menghambat peran perempuan berpartisipasi adalah (1) pemahaman tentang ruang privat dan publik; (2) praktek ideologi *gender* di masyarakat dan (3) nilai budaya dan penafsiran agama yang kurang tepat yang seringkali berkontribusi menghambat partisipasi perempuan dalam pembangunan. Lebih lanjut menurut Madjowa, (2006:124) konstruksi peran yang didasarkan pada perbedaan seksual senantiasa membagi laki-laki dan perempuan dalam peran dikotomis yaitu peran publik dan domestik/privat. Kontruksi peran yang demikian justru sangat merugikan perempuan karena pekerjaannya tidak mendapat pengakuan tinggi secara sosial dan tak memberinya keuntungan finansial bagi kehidupan keluarga.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang sesuai untuk menjawab masalah dan tujuan penelitian adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu kajian yang bertumpu pada data dan informasi yang diperoleh melalui teknik dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para nara sumber guna memahami kondisi kontekstual (data demografi penduduk) dan perspektif subyek penelitian serta mencari pola-pola hubungan yang berguna untuk melakukan interpretasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Penduduk di Kecamatan Witihama**

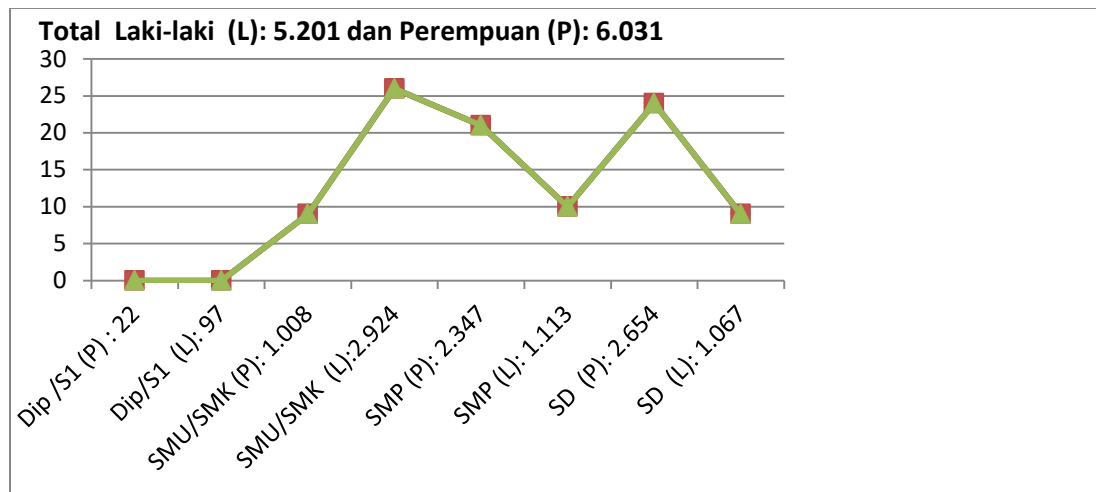
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Camat Witihama diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Witihama pada akhir tahun 2019 berjumlah 14.529 orang (Laki-laki: 6.691 dan Perempuan: 7.838 orang). Sedangkan jumlah KK (kepala keluarga) sebanyak 4.824 orang dan 527 orang di antaranya di kepala perempuan. Menurut Bapak Camat Witihama, jumlah KK perempuan dan penduduk di kecamatan Witihama cenderung bertambah seiring dengan meningkatnya angka perkawinan di kalangan usia muda.

Data penduduk hasil olahan penulis di lapangan juga membuktikan bahwa dari 4.824 KK, terdapat 1929 orang (40%) merupakan KK berusia muda, yaitu rata-rata berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun. Jumlah KK usia muda ini jelas disisi berpotensi mendorong peningkatan jumlah penduduk secara signifikan, namun disisi lain dapat berpengaruh pada penambahan jumlah perempuan sebagai KK. Hal itu terjadi karena kecenderungan masyarakat desa membangun rumah tangga baru diusia yang relatif muda seringkali menghadapi berbagai tekanan sosial budaya dan sosial ekonomi yang sangat berat.

Menerima beratnya tekanan hidup bagi rumah tangga yang relatif muda dan baru akan berakibat pada ketidakseimbangan mental dan terganggunya ekonomi rumah tangga. Itu sebabnya suami dalam rentang waktu beberapa tahun rela meninggalkan istri dan anak dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih baik di daerah lain bahkan ke luar negeri untuk menjadi TKI. Fenomena sosial ini jelas terkonfirmasi dengan data jumlah perempuan KK dari 527 orang, 395 KK (75%) di antaranya berusia di bawah 40 tahun mayoritas suaminya bekerja menjadi TKI dan sebagian kecilnya karena diceraikan suami dan meninggal dunia.

Deskripsi data sebelumnya menunjukkan bahwa dari total penduduk berjumlah 14.529 orang di Kecamatan Witihama, sebanyak 7.838 orang di antaranya adalah kelompok perempuan, namun ketika dibandingkan dengan data tingkat pendidikan justru jumlahnya jauh berada di bawah kelompok laki-laki.

Grafik 2: Deskripsi Data Tingkat Pendidikan Masyarakat menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Witihama, Tahun 2019



Sumber : Diolah dari temuan lapangan dan data penduduk di Kantor Camat

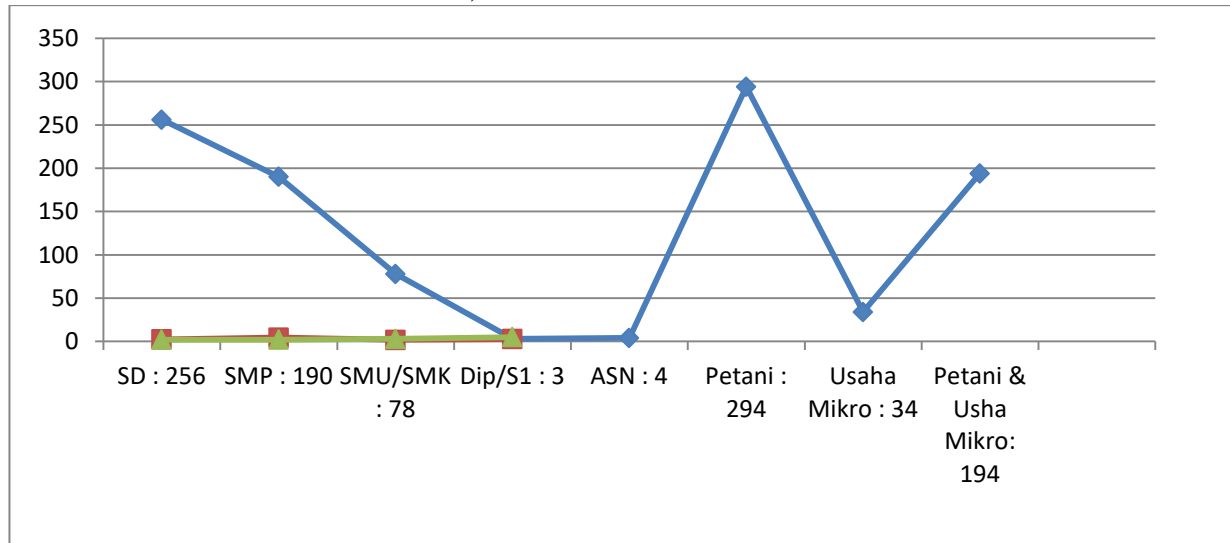
Deskripsi data pada grafik 2 ini memperlihatkan dengan sangat jelas tentang ketimpangan pendidikan antara laki-laki dengan perempuan di Kecamatan Witihama, yakni dari 3.721 orang yang berpendidikan SD, mayoritas sebanyak 2.654 orang (71%) berasal dari kelompok perempuan. Demikian juga halnya dengan penduduk yang berpendidikan SMP berjumlah 3.460 orang, sebanyak 2.347 orang (68%) diantaranya adalah perempuan. Namun sebaliknya jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berpendidikan SMU/SMK maka justru jumlah laki-laki menempati urutan tertinggi dengan jumlah 2.924 orang (74%) dari total jumlah 3.932 orang. Sedangkan perempuan hanya 1.008 orang (26%). Sementara itu dari jumlah penduduk yang berpendidikan diploma dan sarjana (S1) sebanyak 119 orang, 97 orang laki-laki (81%) diantaranya berpendidikan Dip dan S1, dan sisanya hanya 22 orang (19%) perempuan yang berpendidikan Dip dan Sarjana (S1).

Dengan demikian dapat diperkirakan jumlah penduduk yang belum sekolah atau dibawah usia sekolah dasar di Kecamatan Witihama sekitar 3.297 orang. Ketimpangan data pendidikan antara laki-laki dan perempuan ini secara signifikan telah berpengaruh pada kapasitas akses dan kontrol sumber daya yang ada di Desa. Tentu hal ini menjadi problem yang cukup serius dalam mendorong sistem pengelolaan pendidikan berkualitas yang mudah diakses secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Witihama.

### Profil Perempuan Kepala Keluarga (*Single Parent*) di Kecamatan Witihama

Profil perempuan *Single Parent* dapat terbaca dari data jumlah perempuan kepala keluarga berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan yang tergambar dalam grafik berikut.

Grafik 3: Distribusi Perempuan *Single Parent* menurut Tingkat Pendidikan dan Pekerjaan di Kecamatan Witihama, Tahun 2019



Sumber : Diolah dari Data Penduduk di Kantor Camat Witihama, 2019

Data pada Grafik 3 ini telah memperlihatkan dengan jelas bahwa mayoritas tingkat pendidikan perempuan kepala keluarga rata-rata berada pada tingkat SD dan SMP. Sedangkan pekerjaan perempuan kepala keluarga rata-rata sebagai petani maupun petani merangkap usaha mikro atau usaha rumah tangga berskala kecil. Berdasarkan hasil observasi penulis di sejumlah desa diketahui bahwa ternyata sebagian besar dari para ibu kepala keluarga berpenghasilan rata-rata di bawah Rp 25.000 perhari kecuali yang berstatus sebagai pegawai negeri maupun pekerja rangkap sebagai petani dan usaha mikro berskala kecil.

### Keadaan Pendidikan Anak dari Perempuan Kepala Keluarga

Data pada tabel 4 berikut menunjukkan bahwa dari 527 KK yang dikepalai perempuan, mayoritas jumlah anaknya rata-rata berpendidikan sekolah menengah umum dan kejuruan (SMU/SMK). Data pada tabel ini juga mengkonfirmasi bahwa kemampuan perempuan kepala keluarga dalam menyekolahkan anak-anak hanya bisa sampai ke tingkat SMU/SMK saja dan lebih dari itu mereka tak sanggup lagi, kecuali para ibu yang bekerja di instansi pemerintah sebagai guru dan pegawai negeri (ASN). Para ibu sebagai kepala keluarga yang berstatus ASN walaupun kecil jumlahnya tetapi mereka mampu menyekolahkan anak sampai ke jenjang

perguruan tinggi. Berdasarkan hasil observasi di lapangan menunjukkan jumlah anak berpendidikan SMU/SMK diprediksi akan terus bertambah dan berpotensi menciptakan angka pengangguran baru di usia produktif, karena mereka tidak memiliki bekal pengetahuan dan keahlian memadai bersaing di pasar tenaga kerja.

Tabel 4: Distribusi Jumlah Anak menurut Pendidikan dari Perempuan  
*Single Parent* di Kecamatan Witihama, Tahun 2019

No	Jumlah KK	Tingkat Pendidikan Anak				Jumlah
		SD	SMP	SMU/SMK	Dip/S1	
1	60	54	50	58	-	162
2	73	-	42	122	4	168
3	96	45	174	-	-	219
4	85	-	75	117	-	192
5	92	-	-	229	5	234
6	115	-	-	275	-	275
Total	527	99	341	801	9	1.250

Sumber : Diolah dari data penduduk di Kantor Camat Witihama, 2019

Berdasarkan data pada tabel 4 telah memberikan penjelasan yang cukup nyata tentang kondisi pendidikan anak-anak dari perempuan *single parent*. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang lebih serius dari pemerintah dengan mengembangkan program-program inovatif agar lebih kreatif mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat seperti pendidikan vokasi, pelatihan ketrampilan dan magang bagi kelompok usia muda setingkat SMU/SMK, bantuan modal usaha berskala mikro serta membuka lapangan pekerjaan baru yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan SDM yang dimiliki desa.

### **Model Pemberdayaan Perempuan *Single Parent***

Temuan di lapangan membuktikan bahwa sejumlah program pembangunan desa yang digulirkan selama ini belum menyentuh kepentingan langsung mayoritas perempuan. Hal itu terbukti ketika penulis melakukan pelacakan terhadap isi dokumen RPJMDes dan RKPDes di sejumlah desa di Kecamatan Witihama Tahun 2017-2019, ternyata sejumlah program dan kegiatannya rata-rata tidak mengakomodasi kepentingan pemberdayaan perempuan sebagai kepala keluarga (*single parent*). Kalaupun ada program yang mengakomodasi kepentingan perempuan itu hanya sebatas pada kegiatan pelatihan yang berhubungan dengan wilayah domestik yaitu pelatihan

ketrampilan tentang masak memasak. Secara umum program pembangunan yang direncanakan di sejumlah desa mayoritas lebih fokus pada pembangunan fisik desa dan dalam kenyataan perempuan desa hanya dibutuhkan tenaganya saat ada pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil observasi menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan pembangunan fisik desa, tenaga kerjanya sebagian besar berasal dari kelompok perempuan sebagai tenaga upah harian.

Berkaitan dengan pandangan di atas seorang tokoh pendidikan di Kecamatan Witihama, Bapak Takdir Tura Bada berpendapat:

“Secara umum perempuan hanya terlibat dalam pembangunan fisik desa, karena mereka masih sulit mendapatkan tempat untuk bersuara dalam forum-forum resmi desa. Karena mayoritas masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak tahu apa-apa tentang masalah pemerintahan dan pembangunan di desa, tempat mereka hanya berkaitan dengan urusan di dapur. Sebab walaupun mereka hadir di forum, mereka juga tidak berani bersuara melainkan hanya datang duduk dan dengar saja, sehingga mereka lebih banyak dihadirkan saat ada pekerjaan fisik. Meskipun sebagian kecil dari mereka berperan sebagai kepala keluarga telah menunjukkan keberanian tetapi mereka tetap saja perempuan, sehingga tidak mudah baginya menggeser posisi laki-laki begitu saja dalam tata sosial yang masih memegang teguh tradisi budaya lamaholot”.

Pandangan informan tersebut menegaskan tentang betapa kuatnya budaya patriarki yang masih membelenggu ruang gerak perempuan desa guna bersuara di area publik. Rupanya ruang-ruang publik desa masih menjadi tempat yang sakral bagi perempuan mengaktualisasikan dirinya. Perempuan meskipun hadir dalam forum-forum resmi, seperti dalam musrenbangdes dan musdes tetapi tak banyak yang bersuara kritis memperjuangkan kepentingannya.

Berkaitan dengan itu Ibu Vero Lamahoda selaku pegiat NGO, mengemukakan:

“perempuan desa pada umumnya belum memiliki keberanian karena memang budaya Lamaholot tidak membiasakan dirinya bersuara di ruang publik, hidupnya hari-hari hanya bersentuhan dengan aktivitas di dalam rumah. Sementara itu masih minimnya program pemerintah bidang pemberdayaan yang berpihak pada kepentingan perempuan, karena selama ini yang dilakukan pemerintah setempat hanya sebatas membuat program yang berkaitan dengan aktivitas perempuan dalam rumah seperti ketrampilan masak memasak dan menenun serta bantuan modal usaha seadanya”.

Dengan demikian model pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini secara substantif kurang membangun kesadaran dan daya kritisnya tentang hak-hak yang harus diterima, melainkan selalu dituntut melaksanakan kewajibannya sebagai warga desa. Sebab itu program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah desa tak mampu mengentaskan

kemiskinan perempuan kepala keluarga pada hampir semua desa di Kecamatan Witihama. Pemerintah supra desa dan desa rupanya belum menjadikan program pembangunan bidang pemberdayaan sebagai sebuah prioritas. Pada hal arah pembangunan desa dewasa ini mestinya mulai bergeser pada pembangunan sumber daya manusia di desa, terutama yang berhubungan dengan penguatan kapasitas organisasi dan kapasitas individu.

Kemampuan seperti ini sangat dibutuhkan untuk mendukung dan menggerakkan semua potensi sumber daya di desa yang selama ini belum dikelola secara optimal bagi kemajuan masyarakat desa. Itu berarti pendidikan vokasi bagi anak-anak pada umumnya dan perempuan desa pada khususnya menjadi hal yang mendesak. Selain itu para perempuan desa yang tidak melanjutkan pendidikan seharusnya diberikan pelatihan ketrampilan dan magang serta bantuan modal usaha secara kelompok, terprogram dan berkelanjutan agar kelak dapat mengelola sendiri kekayaan sumber daya alam di desa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

Temuan menarik lain juga menunjukkan bahwa pemerintah desa kurang memperhatikan secara serius hak-hak esensial perempuan dan aspirasi politiknya di dalam seluruh proses pembuatan keputusan di desa, sehingga kepentingan perempuan masih sulit diakomodasi dalam program dan anggaran pembangunan desa. Akibatnya derajat kehidupan perempuan pada umumnya dan perempuan *single parent* pada khususnya masih sulit teratasi.

Walaupun para ibu yang berstatus sebagai *single parent* cukup gigih menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, namun ternyata belum mampu mengangkat derajat kehidupannya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan perempuan sebagai *single parent* telah dianggapnya sebagai suatu realitas sosial yang harus dijalani sehari-hari, meskipun terasa berat namun tetap dilakoninya, karena baginya tak ada pilihan lain yang lebih baik yang dapat merubah jalan hidupnya.

Rutinitas harian ini tentu telah menguras banyak waktu, tenaga, pikiran, perasaan serta biaya yang tidak sedikit sehingga memberi beban lebih dan tekanan hidup luar biasa beratnya bagi perempuan baik secara fisik maupun mental. Temuan lain juga membuktikan bahwa keuletan dan ketabahan yang dijalani setiap hari bukan semata-mata untuk merubah nasib dan meningkatkan derajat kehidupan keluarga semata, tetapi juga menjadi bagian penting dari mekanisme sosial merawat budaya guna mempertahankan hidup agar tetap diakui dan eksis di tengah pergaulan sosial. Karena itu tak sedikit perempuan yang berstatus *single parent* gagal membebaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Ada beberapa implikasi yang ditemukan, antara lain: (1) praktek budaya patriarki ternyata masih kuat dan memberi dampak yang sangat serius bagi perempuan dalam berbagai aspeknya terutama pada lemahnya akses dan kontrol sumber daya pembangunan di desa. Akibatnya kepentingan perempuan dan anak-anak kurang terakomodasi dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan desa; (2) Kuatnya cengkraman mesin budaya patriarki sesungguhnya telah lama melumpuhkan daya kritis perempuan dan kesempatan mengenyam pendidikan lebih tinggi guna meraih masa depan setara laki-laki; (3) Sejumlah anak yang ditinggalkan orangtuanya telah kehilangan kasih sayang, pegangan hidup dan terpaksa putus sekolah.

Demikian juga halnya dengan relasi kuasa perempuan umumnya dan perempuan yang berstatus *single parent* pada khususnya cenderung sangat lemah dan berjalan satu arah. Pemerintah desa selalu dalam posisi dominasi atas seluruh proses pengambilan keputusan di desa, sedangkan perempuan *single parent* dikondisikan pada posisi pasif dan perannya hanya dibutuhkan ketika ada kegiatan sosial budaya dan pekerjaan fisik desa, sehingga keberadaannya masih terpinggirkan. Akibatnya sejumlah program pembangunan desa lebih menguntungkan kepentingan laki-laki.

Model pemberdayaan perempuan yang dapat dikembangkan di desa seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kesadaran kritis dan derajat kehidupannya melalui pendidikan vokasi, bantuan modal usaha, pelatihan ketrampilan dan magang yang berbasis sumber daya lokal di segala aspeknya, termasuk memperhatikan secara serius pelibatan penuh perempuan *single parent* dalam seluruh proses pembuatan keputusan di desa. Model pemberdayaan seperti ini pada hakikatnya bertujuan merubah kerangka dan cara berpikir baru perempuan agar lebih rasional dan terbuka terhadap perubahan serta mampu mengaktualisasikan hak-hak esensialnya sebagai warga negara setara dengan laki-laki.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perempuan *single parent* di Kecamatan Witihama cukup gigih memainkan peran strategisnya sebagai ibu rumah tangga dan kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam mengatasi kemiskinan. Meskipun begitu tak bisa dipungkiri, masih banyak tantangan dan kendala yang dihadapi belum sepenuhnya terpecahkan, terutama yang terkait dengan kendala struktur dan kultur masyarakat. Itu sebabnya dalam kenyataan tak semua perempuan kepala keluarga menampilkan sosok tangguh dan *survival* dalam mengelola kehidupan rumah tangga,

termasuk membesarkan dan mendidik anak-anak sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Karena itu beberapa dari mereka rela meninggalkan anak-anaknya dengan alasan mencari suami baru karena tak sanggup menanggung beban hidup rumah tangga dengan segala resikonya.

Minimnya kapasitas pendidikan dan ketrampilan perempuan berbasis sumber daya lokal disebabkan oleh kuatnya kontribusi budaya patriarki dan langgengnya dominasi laki-laki di wilayah publik. Ketidaksihlian pemerintah daerah dan desa dalam melaksanakan program pemberdayaan yang pro terhadap kepentingan esensial perempuan *single parent* juga ikut memperburuk kehidupan perempuan dan anak-anak.

Kebijakan di bidang pemberdayaan melalui program pendidikan dan kesehatan gratis dari Negara melalui Dana BOS, KIP, KIS maupun PKH bagi rumah tangga miskin di desa dalam implementasinya kurang mampu menolong dan mengangkat derajat kehidupan perempuan *single parent* dan anak-anak secara adil dan merata.

### **Rekomendasi**

Dalam rangka memperkuat kapasitas warga desa pada umumnya dan kapasitas sosial politik perempuan *single parent* khususnya, maka direkomendasikan beberapa hal:

1. Perencanaan dan penganggaran desa mestinya berbasis *gender budget* dan *pro poor budget* bagi anak-anak dari keluarga tak mampu pada umumnya dan anak-anak perempuan *single parent* pada khususnya melalui program penyediaan asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi anak-anak desa;
2. Pemerintah supra desa dan pemerintah desa mestinya lebih proaktif dan agresif dalam mengimplementasikan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama menyangkut pasal-pasal tentang tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui program-program unggulan yang lebih *responsive gender* agar tak ada lagi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan di Desa. Karena itu model pemberdayaan yang sesuai dengan perempuan *single parent* adalah melalui pendekatan pendidikan vokasi, pelatihan ketrampilan dan magang berbasis sumberdaya lokal serta bantuan modal usaha kelompok berskala mikro yang lebih komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Kebijakan di bidang pemberdayaan dan program afirmatif yang digulirkan Negara bagi kelompok masyarakat miskin umumnya dan perempuan khususnya di desa, mestinya lebih komprehensif dan terintegrasi dengan basis data yang lebih akurat agar bisa menjangkau semua

kebutuhan sosial ekonomi serta pendidikan dan kesehatan anak-anak yang berasal dari rumah tangga perempuan tak mampu.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Antlov, Hans, (2003) *Negara dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal*, Lappera, Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Darwin, Muhadjir M, (2005a) *Memanusikan rakyat, penanggulangan kemiskinan sebagai arus utama pembangunan*, Benang Merah, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, (2005b) *Negara dan Perempuan: reorientasi kebijakan publik*, Graha Guru Yogyakarta.
- Eko, Sutoro, (2004c) *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Engels, Friedrich, (2011) *Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara*, Yayasan Kalyanamitra, Jakarta.
- Fakih, Mansour, (2008) *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan LSM Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamidi, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang.
- Hardjo, Antonio Pradjasto, dkk, (2008) *Mendahulukan Si Miskin; Buku Sumber bagi Anggaran Pro Rakyat*, LKiS, Yogyakarta
- Kabeer, N. (1999). "Resources, agency and achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment". *Development and Change*, 30(3): 435–464.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong, (2007) *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, (2013) *Metode penelitian kualitatif*, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mosse, Julia Cleves , (2007) *Gender dan Pembangunan..Terjemahan*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Projono,O.S dan Pranarka, A.M.W, (2006) *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan implementasi*. CSIS; Jakarta.

- Revrison, Baswir, (2010) *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Reni, Sutyastie Soemitro dan Tjiptoherijanto, Prijono, (2003) *Kemiskinan dan ketidakmerataan di Indonesia ( Suatu analisis Awal )*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetomo, (2008) *Strategi-strategi Pembangunan masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Suharto, Edi,(2009) *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Sumodiningrat, Gunawan, (2009) *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sudarwati, Ninik, (2009) *Kebijakan pengentasan kemiskinan, mengurangi kegagalan penanggulangan kemiskinan*, Intimedia, Malang.
- Susanto, Budi, dkk, ed, (2002) *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*, Kanisius, Yogyakarta,
- Singarimbun, Masri, ed, (2008) *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Writhatnolo,Randy R.dkk, (2005) *Membangun Indonesia Emas:Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-bangsa yang Unggul dalam Persaingan Global*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

**Jurnal :**

- Arjani, Ni Luh, (2007) *Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki*, ejournal.unud.ac.id, Denpasar, Vol.6 No.1
- Astuti, Mulia, (2012) *Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Entrepreneurship (Studi Kasus Di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat*, Jurnal Sosiokonsepsia, Vol 17 No.3
- Chudari, Imah Nimah, (2007) dalam *Jurnal Pendidikan Dasar* No 8 Bulan Oktober
- Hartini, Titik, (2012) *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan : Keluar dari Kemiskinan*, dalam *Jurnal Perempuan* 74, Vol 17 No 3 Jakarta.
- Kabeer, N. (2005). "Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of The Third Millenium Development Goal". *Gender and Development*, Vol. 13, No1, March 2005.
- Rinusu, (2006) *Gender Budget Analysis Upaya Mewujudkan Keadilan Gender* dalam *Jurnal Perempuan*, No 46, Jakarta.

- Suryani, Yusnita Marlia, tesis, (2010) *“Penyesuaian Diri Ibu Sebagai Kepala Keluarga Studi Kasus di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali”* Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sen, Amartya, (2007) *Politik Kesejahteraan di tanah Republik*, pengantar dalam *Jurnal Mandatory*, edisi 3, Yogyakarta.
- Nina, Nurmila, (2002) *Ketika Perempuan Mencari Nafkah”*, Jurnal HARKAT- Media Komunikasi Gender, Jakarta.
- Madjowa, Verrianto, (2006) *Tergesernya Kepemimpinan Perempuan di Gorontalo*, Jurnal Perempuan, No 46, Jakarta.
- Maton, K.I. (2008). “Empowering Community Settings: Agents of Individual Development, Community Betterment, and Positive Social Change”. *American Journal of Community Psychology*, 41:4-21
- Mayoux, L. (2000), *“Micro-finance and the empowerment of women. A review of the key issues”*. Social finance working paper (23), Geneva: International Labour Organization
- Triwibowo, Darmawan, (2012) *Kerentanan Perempuan terhadap Kemiskinan: temuan empiris dan tantangan pengarusutamaan gender*, Jurnal Perempuan, 74 Vol 17 No 3
- Yusnita, Marlia Suryani, (2010) *Penyesuaian Diri Ibu Sebagai Kepala Keluarga Studi Kasus di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali”* (Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Venny, Adriana, (2006) *Mempertanyakan Kebijakan Anggaran*, dalam Jurnal Perempuan, No 46, Jakarta.

**Dokumen :**

- Undang-Undang Dasar 1945, Bab Xa Tentang Hak-Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- BPS, (2008) Data dan Informasi Kemiskinan , Jakarta Indonesia Tahun 2008
- Kompas.Com, 6 Maret 2020
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari Bappenas Tahun 2015-2019,
- Wawancara dengan Bapak Takdir Tura Bada, selaku pengamat pendidikan, Tanggal 5 Januari Tahun 2019
- Wawancara dengan Ibu Vero Lamahoda, selaku pegiat NGO, Tanggal 12 Januari Tahun 2019